

**PENGARUH BELANJA DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP JUMLAH
KEMISKINAN Di KABUPATEN CILACAP**

PERIODE TAHUN 2011 – 2016

(Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 - 2016)

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Riko Tri Fasholla
Nomor Mahasiswa : 14313081
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018**

**Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap**

Periode Tahun 2011 – 2016

(Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 - 2016)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Riko Tri Fasholla

Nomor Mahasiswa : 14313081

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Penulis,


Riko Tri Fasholla

PENGESAHAN

Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah

Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap

Periode Tahun 2011 – 2016

(Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 - 2016)

Nama : Riko Tri Fasholla
Nomor Mahasiswa : 14313081
Jurusan : Ilmu Ekonomi



Yogyakarta, 15 Maret 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suharto', is written over the text 'Dosen Pembimbing,'.

Suharto, S.E., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH BELANJA DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN DI KOTA CILACAP TAHUN 2011-2016**

Disusun Oleh : **RIKO TRI FASHOLLA**

Nomor Mahasiswa : **14313081**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 13 April 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Rindang Nuri Isnaini N., SE., M.E.K.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT atas lindungan dan karunia-Nya.

Saya persembahkan skripsi ini kepada seluruh keluargaku,

Ibu, wanita terhebat yang ku miliki, Doa ibu menyelimuti setiap langkahku.

*Kemanapun aku pergi, dimana pun aku ditempatkan, aku bersama-sama dengan
doanya.*

Bapak, lelaki panutanku, yang tak pernah mengecewakanku sekalipun.

*Nenekku dan Saudara kandungku atas segala cinta, kasih sayang, dukungan,
kepercayaan dan doa tulus yang selalu dipanjatkan untukku.*

Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang memberikan jalan kemudahan dan keteguhan hati dari kesukaran, karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH BELANJA DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP JUMLAH KEMISKINAN Di KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2011 - 2016”**Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami ke kehidupan yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesai nya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Suharto, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan keterbatasan inilah, penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun bukanlah berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini

bisa diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak Suharto, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama mengerjakan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan penulis.
4. Bapak Anjar yang telah banyak membantu dalam urusan akademik.
5. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya serta yang selalu menasehati dan memberi arahan dalam setiap masalah yang dihadapi penulis.
6. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa membimbing, mendorong, mendoakan dan mencurahkan kasih sayang sehingga menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 ini.
7. Ani Safitri, Jecinda Rizqiyah, Arinta Dhiany Suseno, Widyaswari Kusumaningrum, Nurul Latifah, M. Harisa Fachreza Yanuar, Ivan Zuhendra, Slamet Widodo, Addy Prasetyo, Setyo Abdi, Biananta Fikri Hidayat serta kawan terdekat seperjuangan. Terima kasih atas sumbang saran, pemikiran-pemikiran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

8. Teman seperjuangan selama satu bulan di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bruno, Desa Kemranggen khususnya untuk KKN ANGKATAN 56 posko UNIT 73 Dusun Gablogan yang beranggota (Iwan, Hasan, Rizal, Agil, Eza, Rica, Risti)
9. Keluarga Ilmu Ekonomi serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Penulis

Riko Tri Fasholla

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xi
Halaman Daftar Gambar	xii
Halaman Lampiran.....	xiii
Halaman Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1. Kajian Pustaka	10
2.1.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1. Kemiskinan.....	12
2.2.2 Belanja Daerah.....	16
2.2.3. Jumlah Penduduk.....	22
2.2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen Dengan Variabel Independen.....	29
2.3.1 Hubungan Kemiskinan dengan Belanja Daerah	29
2.3.2 Hubungan Kemiskinan dengan Jumlah Penduduk.....	30

2.3.3. Hubungan Kemiskinan dengan Pendapatan Asli Daerah.....	31
2.4 Kerangka Pemikiran	33
2.5 Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data.....	35
3.1.1 Jenis Data.....	35
3.1.2 Cara Pengumpulan Data	35
3.1.3 Ruang Lingkup Penelitian	36
3.1.4 Variabel Penelitian	36
3.2 Metode Analisis.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Pemilihan Model Yang Tepat.....	41
4.1.2 Pemilihan antara Model Fixed Effects dengan Model Random Effects (Uji Hausman)	44
4.1.3 Estimasi Model <i>Fixed Effect</i>	46
4.2 Pengujian Statistik	50
4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	50
4.2.3 Uji Signifikansi (Uji T)	51
4.2 Pembahasan	54
4.3.1 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan.....	54
4.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan	56
4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan...	57
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Implikasi	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Hasil Regresi Antara <i>CEM</i> dengan <i>FEM</i> (Uji Chow)	43
4.2 Hasil Regresi Antara <i>FEM</i> dengan <i>REM</i> (Uji Hausman).....	45
4.3 Output Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Peta Kabupaten Cilacap	4
1.2 Jumlah Kemiskinan	6
1.3 Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Output Hasil Regresi <i>Common Effect Model</i>	66
II. Output Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	67
III. Output Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i>	68
IV. Hasil Likelihood Ratio Test (Chow Test).....	70
V. Hasil Uji Hausman.....	72
VI. Tabel Data	75

ABSTRAK

Kabupaten Cilacap mempunyai struktur perekonomian yang sangat beragam, mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani, pedagang dan nelayan. Di lihat dari segi perekonomian, pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Cilacap. Tetapi dengan beragam sektor yang ada masih banyak terdapat penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 2) Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 3) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap, 4) Menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section* dari tahun 2011 hingga 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan, Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan, Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap Jumlah Kemiskinan dan secara bersama-sama ketiga variabel Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

Kata Kunci : Jumlah Kemiskinan, Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRAK

Cilacap Regency has a very diverse economic structure, the majority of people's livelihoods are farmers, traders and fishermen. In view of the economic aspect, agriculture is the main sector of the economy in Cilacap regency. But with various sectors there are still many poor people. This study aims to: 1) Analyze the influence of Regional Expenditure on Poverty in Cilacap Regency, 2) Analyze the Influence of Total Population to Total Poverty in Cilacap Regency, 3) Analyze the influence of Local Original Income on Number of Poverty in Cilacap Regency, 4) Analyze the influence of Regional Expenditure, Population, and Local Original Income together affect the Total Poverty in Cilacap Regency. The data used in this study is panel data is a combination of time series data and cross section data from 2011 to 2016. The results of this study indicate that Regional Expenditure has a positive effect on the amount of poverty, the number of residents has a positive effect on the amount of poverty, of Total Poverty and together the three variables Regional Expenditure, Total Population, and Local Original Income affects the Total Poverty in Cilacap Regency in 2011-2016.

Keywords: Total Poverty, Regional Expenditure, Total Population, Local Original Income.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

Salah satu pokok permasalahan yang belum terselesaikan sampai sekarang khususnya di Indonesia dan daerah-daerah didalamnya yaitu masalah kemiskinan, menjadi permasalahan umum di berbagai daerah, kemudian pada topik-topik pembicaraan dan diskusi yang marak diangkat juga sebagai tema pokok permasalahan pembicaraan dimanapun. Mengatasi masalah kemiskinan tidak

dapat di lakukan secara terpisah dari masalah jumlah penduduk yang semakin meningkat, semakin bertambahnya jumlah pengangguran, serta kesehatan dan pendidikan yang tidak memungkinkan untuk menambah tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang yang dikategorikan miskin yang sangat berkaitan erat dengan masalah kemiskinan tersebut. Untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan pendekatannya harus masuk dalam ruang lingkup sektor, lintas pelaku secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional.

Kondisi kemiskinan yang semakin membelenggu sebagian besar masyarakat kita hingga kini masih menyimpan banyak perdebatan. Perdebatan terutama mengenai seputar konsep, teori serta metode-metode yang menyangkut tentang kondisi kemiskinan di sekitar kita. Perdebatan dimulai dengan penyusunan indikator, konsep, serta langkah-langkah yang harus diambil begitu juga dengan bagaimana cara mengatasinya, atau dengan bahasa praktisnya penanggulangan kemiskinan supaya semakin berkurang. Hal ini menjadi semakin kontras, tatkala pihak-pihak yang mengalami atau berada dalam 'lingkaran kemiskinan' terus bertambah jumlahnya.

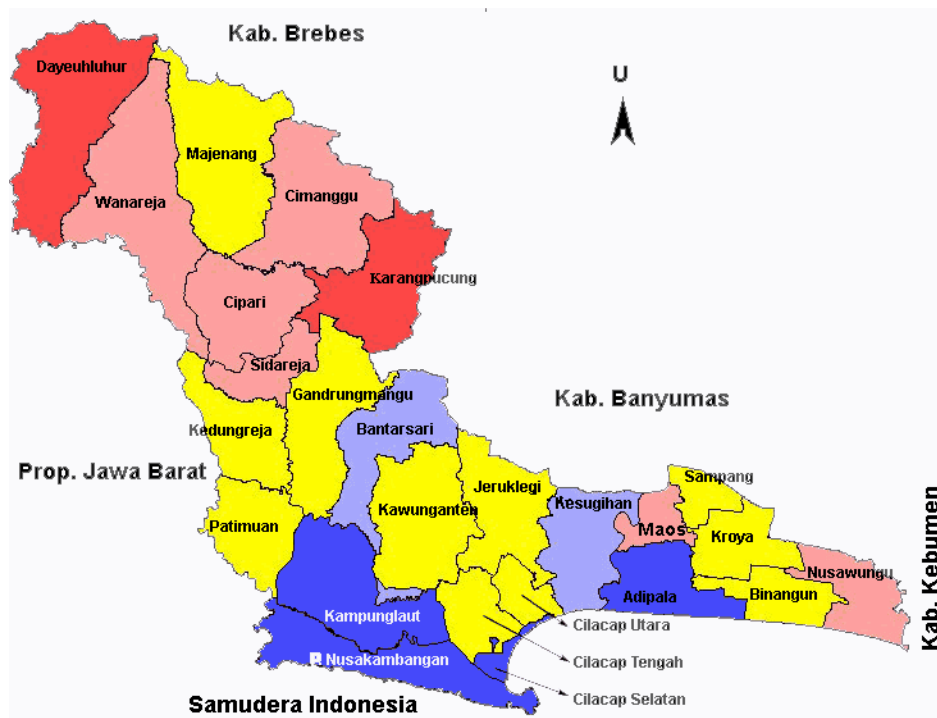
Fenomena kemiskinan berkaitan erat dengan konsep dan permasalahan ketidakadilan dan disintegrasi kelompok, menunjuk pada jalinan konsep yang memberi sebuah pengertian yang saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing konsep bisa dilihat secara tunggal dengan pengertian tersendiri atau analisis saling keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam konteks kausalitas. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya ketidakadilan perlakuan di masyarakat yang dapat mengganggu rasa kebersamaan, serta tidak adil dalam pemerataan yang berakibat pada pertentangan dan perpecahan.

Pola kekuasaan yang ada memungkinkan sebagian kecil atau sekelompok individu menganggap dirinya tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama memperoleh asset dan akses untuk berkembang. Berpotensi terbentuknya kelompok minoritas yang merasa miskin karena proses pemiskinan yang berlangsung. Kelompok seperti ini akan menjadi akar di masyarakat yang berperilaku menyimpang sehingga terjadilah konflik dengan dampak yang lebih luas, yaitu disintegrasi masyarakat.

Sebaliknya terjadinya gejala disintegrasi di masyarakat dengan mudarnya kebersamaan diantara warga masyarakat memberikan ciri-ciri melemahnya pada pola interaksi sosial, menghilangnya rasa kebersamaan diantara sesama warga dan berdampak pada tindak ketidakadilan dan berlangsungnya proses pemiskinan dikalangan warga masyarakat (Astika, 2010).

Gambar 1.1

Peta Kabupaten Cilacap

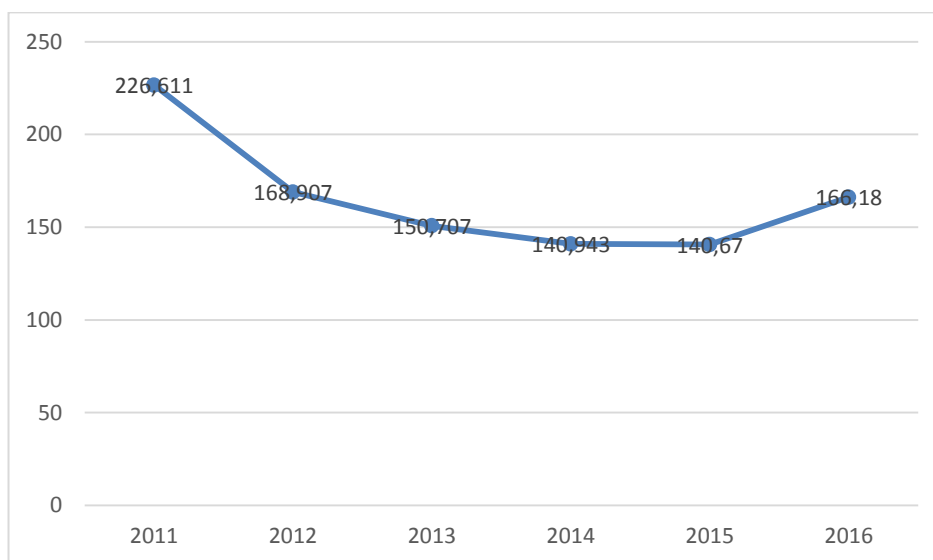


Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatannya adalah Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Cilacap adalah 225.360,84 Ha atau 6,94% dari luas Provinsi Jawa Tengah termasuk Pulau Nusakambangan dengan luas 11.510,522 Ha dan terletak diantara $108^{\circ}4-30^{\circ}$ - $109^{\circ}30^{\circ}30^{\circ}$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}30^{\circ}$ - $7^{\circ}45^{\circ}20^{\circ}$ garis Lintang Selatan. Luas wilayah tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah seluas 62.261,286 Ha (29,11%) dan lahan kering atau bukan lahan

sawah seluas 150.787,911 Ha (70,89%). Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan dengan 284 desa/kelurahan.

Topografi wilayah Kabupaten Cilacap meliputi daerah rawa-rawa hingga daerah perbukitan, dengan ketinggian dari permukaan laut terendah adalah 6 meter di kota Cilacap dan tertinggi 198 m di Dayeuhluhur. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km yaitu dari wilayah Kecamatan Dayeuhluhur sampai ke wilayah Kecamatan Nusawungu, sedangkan dari utara ke selatan sepanjang 35 Km yaitu dari wilayah kota Cilacap ke wilayah Kecamatan Sampang. Dengan keadaan alam yang demikian mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani, pedagang dan nelayan. Di lihat dari segi perekonomian, pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Cilacap. Subsektor nelayan digeluti sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai selatan. Cilacap adalah satu dari tiga kawasan industri utama di Jawa Tengah (selain Semarang dan Surakarta). Sektor perikanan laut masih harus banyak digali dan dimaksimalkan, karena potensinya yang begitu besar masih belum banyak tersentuh dan sebaiknya investasi diarahkan untuk mengembangkan potensi tersebut.

Gambar 1.2
Jumlah Kemiskinan (ribu jiwa) Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2016



Gambar 1.2 menjelaskan jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Cilacap tahun 2011-2016. Jumlah kemiskinan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 220.611 jiwa, kemudian pada tahun 2015 jumlah kemiskinan yang paling rendah yaitu sebesar 140.670 jiwa. Sedangkan secara keseluruhan dari tahun 2011-2015 jumlah kemiskinan selalu mengalami penurunan, tetapi berbanding terbalik pada tahun 2016 jumlah kemiskinan kembali meningkat meskipun tidak secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 – 2016”**. Alasan penelitian ini dilakukan karena pada penelitian terdahulu belum dilakukan di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya

penelitian per kecamatan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 - 2016, baik dalam pengujian tiap variabel maupun ketiga variabel secara bersama-sama. Pengolahan data yang dilakukan akan menggunakan regresi data panel, yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 - 2016?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 - 2016?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 - 2016?
4. Apakah Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 – 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 – 2016.
2. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 – 2016.
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 – 2016.
4. Menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode 2011 – 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat :

1. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Kemiskinan, khususnya di Kabupaten Cilacap.
2. Menyediakan informasi bagi pemerintah daerah mengenai pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Kemiskinan.
3. Bagi Penulis, untuk melatih kemampuan menulis serta untuk menerapkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan.

4. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Menurut Santoso (2013) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. Peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari data yang diperoleh dari BPS dan Direktorat Jendral Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2007-2010. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari peningkatan PAD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemungkinan kebijakan penarikan PAD memberatkan masyarakat, dan pungutan PAD yang diperoleh, serta penerimaan DAU dari pemerintah pusat tidak didukung oleh pengeluaran pemerintah yang tepat dan produktif serta menunjang untuk pertumbuhan ekonomi. Pengaruh DAK dan DBH terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah semestinya signifikan, sementara itu PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah. Sedangkan DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran daerah

Firdaus (2011), dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan di Sulawesi periode 2006-2010. Peneliti menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi data panel. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan, yang artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah. Variabel pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan signifikan, berarti semakin tinggi pengangguran terbuka maka jumlah penduduk miskin akan mengalami kenaikan. Variabel banyaknya murid SD Negeri (APS) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan yang mempengaruhi kemiskinan. Hal ini karena angka partisipasi sekolah kelompok usia menengah (13-15 tahun) tidak mempunyai pengaruh dalam penurunan kemiskinan. Data yang tidak signifikan menandakan bahwa angka partisipasi sekolah tidak mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tidak signifikannya angka harapan hidup disebabkan karena angka harapan hidup di Sulawesi masih rendah.

Hendra (2010) penelitian ini membahas tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kalimantan Timur”. Peneliti menggunakan data sekunder dan metode analisis regresi data panel. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Variabel pengangguran terbuka mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan. Variabel lulusan SMA/SMK mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dimana semakin tinggi PDRB maka jumlah kemiskinan juga akan meningkat.

Hasil penelitian Iskana (2009) pada penelitian tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur menjelaskan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Setiyawati (2007) dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh PAD, DAU, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menemukan hasil penelitian bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak arti, dan sebagian besar mengkaitkan antara konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya serta menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan relatif dan

kemiskinan absolut. Kemudian dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah. Syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing daerah atau wilayah. Karena faktor penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya.

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih negara berkembang seperti Indonesia dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri. Sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan asset, organisasi politik, pengetahuan, dan ketrampilan serta asset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Kemiskinan seringkali disebabkan dengan tingginya jumlah pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha, tidak memiliki pengetahuan yang luas, jenjang pendidikan yang rendah, serta terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang dikelompokkan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234-235).

Kemiskinan relatif merupakan keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian seseorang dikategorikan kemiskinan absolut jika pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Apabila dilihat dari pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu *cyclical poverty*, *persistent poverty*, *accidental poverty* dan *seasonal poverty*. Pola *cyclical poverty* adalah kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah yang penduduknya tergolong miskin umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya terisolasi, sehingga tidak memiliki akses jalan dan transportasi dengan daerah

lainnya. Pola *accidental poverty* adalah kemiskinan dikarenakan adanya bencana alam atau dampak dari adanya suatu kebijakan tertentu dan kesejahteraan suatu masyarakat. Dan yang terakhir pola *seasonal poverty* adalah kemiskinan musiman seperti sering ditemukan pada masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pada pertanian tanaman pangan.

Kemiskinan menurut *World Bank* (2006) merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang layak sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya, standar rasio kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* adalah 2\$/day (dua dollar per hari) artinya seorang individu atau kelompok yang memiliki pendapatan kurang dari dua dollar dikatakan miskin.

Menurut (Todaro 1997) masyarakat miskin memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
- 2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan,
- 3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya,
- 4) Perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
- 5) Perbedaan struktur industri,
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain,

- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

2.2.2 Belanja Daerah

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib

pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka (Setiawan, 2011).

Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Halim (2003), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah

pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu :

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi :

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran :

1. Angsuran Pinjaman
2. Dana Bantuan
3. Dana Cadangan

e. Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja :

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja Barang dan Jasa,
- 3) Belanja Modal

2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai,
- 2) Belanja bunga,
- 3) Belanja subsidi,
- 4) Belanja hibah,
- 5) Belanja bantuan sosial,
- 6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2.2.3. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Disamping itu, penambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin kompleksnya kebutuhan. Pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Apabila angka fertilitas lebih besar daripada angka mortalitas, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif. Begitu juga dengan migrasi, apabila nilai migrasi masuk lebih besar daripada nilai migrasi keluar, maka pertumbuhan penduduk menjadi positif.

Dampak negatif dari laju pertumbuhan penduduk yaitu :

- 1) Angka kemiskinan meningkat.
- 2) Angka pengangguran meningkat.
- 3) Lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang.
- 4) Semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan, industri peternakan dan lain-lain.
- 5) Ketersediaan pangan sulit.
- 6) Pembangunan di daerah diuntut banyak.

Menurut Dr. Kartomo (2013), beliau mengungkapkan pengertian tentang penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara atau pun bukan.

Menurut Devita (2014), secara umum penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis dalam kurun waktu selama enam bulan atau bahkan lebih tetapi dengan tujuan menetap. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk disuatu wilayah anantara lain yaitu :

- a. Fertilitas (Kelahiran). Fertilitas menyangkut banyaknya jumlah bayi yang hidup lahir disuatu wilayah.
- b. Mortalitas (Kematian). Mortalitas merupakan banyaknya jumlah kematian manusia disuatu wilayah. Faktor ini menentukan jumlah penduduk pada wilayah tertentu. Data jumlah kematian diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk.
- c. Migrasi. Migrasi dapat di definisikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ketempat lainnya melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Sehingga migrasi merupakan perpindahan relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Dengan adanya migrasi maka dapat mempengaruhi jumlah penduduk disuatu wilayah.

Sumber data kependudukan dapat dikelompokkan berdasarkan tiga metode, yaitu sensus penduduk, survei dan registrasi.

1. Sensus. Sensus merupakan keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, dan menyusun serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu wilayah atau daerah.
2. Survei. Survei dan sensus tidak jauh berbeda hanya saja terletak pada cakupan wilayah, bila sensus mencacah seluruh penduduk namun survei hanya mencacah sebagian penduduk saja.
3. Registrasi. Registrasi merupakan kumpulan keterangan terjadinya peristiwa-peristiwa kelahiran dan kematian serta segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak orang tersebut lahir sampai mati.

2.2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikatakan sebagai pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah melalui sistem pemerintahannya dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah tersebut. Sehingga pendapatan asli daerah merupakan pendapatan rutin yang diterima pemerintah daerah dari usaha-usaha dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas disetiap daerah.

PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pelaksanaan

pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan, PAD setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih baik besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karenamemiliki PAD yang rendah. Tingginya PAD suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah berkembang dengan baik terutama dalam hal menciptakan nilai output. Besarnya nilai output yang dihasilkan disebabkan adanya kesempatan untuk berusaha. Sehingga dengan adanya kesempatan berusaha tersebut dapat membantu menyerap tenaga kerja semakin besar.

Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengolahan sumber daya alam (Bastian, 2002). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan dimana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola

sumber pendapatan tersebut dengan besar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1) pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah redistribusi daerah.

2) retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

4) lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- jasa giro
- pendapatan bunga
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak
- Pendapatan denda retribusi
- Pendapatan eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian
- Fasilitas sosial dan umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

- Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

Pendapatan asli daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah maupun bendahara penerimaan, yang menambah ekuitas dana merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Ritonga (2009) mengatakan PAD terdiri dari :

1. Pajak daerah, yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari pungutan pajak daerah.
2. Retribusi daerah, merupakan penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari retribusi daerah misalnya retribusi pelayanan kesehatan, air, jembatan, dan lain-lain.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan PAD yang bukan merupakan klasifikasi PAD.

Dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan penghasilan yang didapat melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu meningkatkan kas daerah yang benar-benar dari daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang untuk memperoleh dana. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang harus selalu ada dan terus menerus ditingkatkan pertumbuhannya.

2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen Dengan Variabel Independen

2.3.1 Hubungan Kemiskinan dengan Belanja Daerah

Perlu diketahui bahwa belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai merupakan bagian dari belanja yang mendukung kegiatan pembangunan salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan walaupun berdasarkan analisis model yang diperoleh terdapat juga belanja yang memberikan pengaruh yang signifikan namun tidak sesuai dengan harapan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Penurunan jumlah kemiskinan merupakan salah satu program nasional yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dana untuk program tersebut tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tapi juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada penelitian tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur menjelaskan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran (Iskana, 2009).

H_1 : terdapat hubungan positif antara BD dengan JK

2.3.2 Hubungan Kemiskinan dengan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah merupakan permasalahan yang sangat mendasar, karena pertumbuhan penduduk setiap tahun-nya selalu mengalami peningkatan dan sulit dikendalikan atau dicegah sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat serta menekan jumlah kemiskinan. Menurut Hermanto (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan metode panel data mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dengan kemiskinan.

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap pembangunan. Yang pertama yaitu pandangan optimis, berpendapat bahwa penduduk adalah asset yang memungkinkan untuk mendorong

pembangunan ekonomi dan inovasi teknologi yang dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Menurut pandangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, juga berdampak buruk bagi pengembangan tabungan, sumberdaya manusia, serta cadangan devisa. Kedua yaitu pandangan pesimistis, berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dapat mengakibatkan dan mendorong pengurasan sumberdaya, kehancuran ekologis, kekurangan tabungan, dan kerusakan lingkungan yang kemudian memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kelaparan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Menurut Todaro (2000) bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut dibuktikan dalam perhitungan indeks *Foster Greer Thorbecke* (FGT), yang mana jika jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

H₂ : terdapat hubungan positif antara JP dengan JK

2.3.3. Hubungan Kemiskinan dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berasal dari seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi wilayah asli daerah tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PAD sebesar -67,9% dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan PAD maka akan mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan. Jika terdapat penurunan PAD maka jumlah kemiskinan akan bertambah. Penelitian ini menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi periode 2000-2012. Penerimaan PAD yang diperoleh daerah berasal

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya nilai PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk membangun industri kreatif dan menggali potensi daerah yang bertujuan untuk menciptakan perusahaan-perusahaan daerah yang lebih produktif.

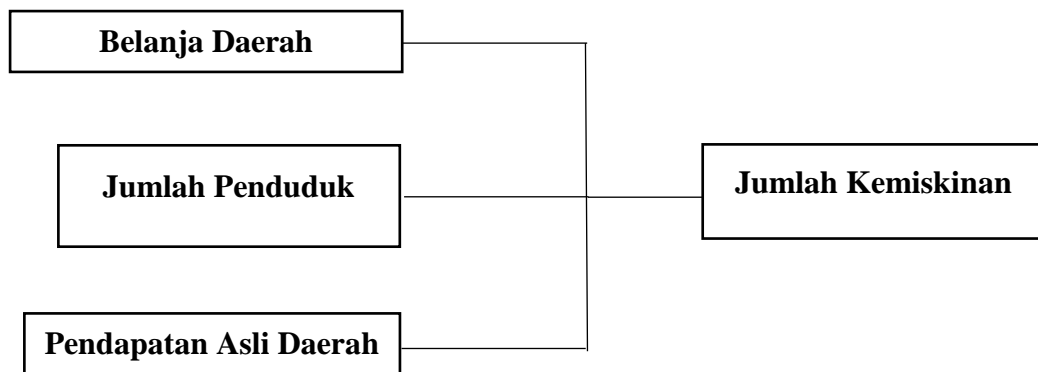
Peningkatan industri kreatif yang tercipta melalui pengelolaan PAD dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri. Peningkatan industri kreatif pastinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Semakin banyaknya kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur. Adanya berbagai industri kreatif yang dibangun lewat PAD ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan yang diterima oleh masyarakat kabupaten Banyuwangi. Semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh masyarakat maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi berbagai kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hidupnya (Firmansyah 2015).

H_3 : terdapat hubungan negatif antara PAD dengan JK

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian dalam studi ini menjelaskan bahwa Kemiskinan dipengaruhi oleh tiga hal, sebagai berikut :

Gambar 1.3 Skema Kerangka Pemikiran



Untuk mengurangi Jumlah Kemiskinan, maka perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan tersebut. Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi Jumlah Kemiskinan antara lain: Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan, maka diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menentukan kebijakan yang tepat agar dapat mencapai tujuan yaitu untuk mengurangi jumlah tingkat Kemiskinan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu persoalan dan perlu di uji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode tahun 2011 - 2016.
2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode tahun 2011 - 2016.
3. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode tahun 2011 - 2016.
4. Diduga Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode tahun 2011 - 2016.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dihimpun oleh pihak lain dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel yaitu gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu.

3.1.2 Cara Pengumpulan Data

Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dari sumber pertama yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sementara data sekunder merupakan data tidak langsung yang bersumber dari arsip-arsip atau dokumen resmi yang sudah tersedia. Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap.

- b. BPPKAD Kabupaten Cilacap (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah).
- c. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari teori dari buku dengan melakukan analisis perbandingan yang sesuai dengan penelitian ini.
- d. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul pada penelitian diatas yaitu “Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode 2011 – 2016“, penulis memfokuskan pada pembahasan tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap serta melakukan penelitian kepada 24 kecamatan periode 2011 - 2016 di Kabupaten Cilacap sebagai penunjang penelitian.

3.1.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 60). Pada penelitian tentang Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode

2011 – 2016 ini membahas dua variabel, yaitu variable dependen (variable terikat) serta variabel independen (variabel bebas).

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi akibat dari adanya perubahan yang ditimbulkan oleh variabel independen (variabel bebas). Sementara itu Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang membawa pengaruh atau menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel dependen (variabel terikat).

Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Belanja Daerah sebagai X_1 , Jumlah Penduduk sebagai X_2 , serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai X_3 . Sementara yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Jumlah Kemiskinan sebagai (Y) di Kabupaten Cilacap.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan alat pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9. Data panel merupakan data gabungan dari data *time-series* dan data *cross-section*. Analisis data merupakan proses mengurutkan data menurut kategori, pola, serta satuan dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja dari suatu penelitian.

Keunggulan penggunaan data panel dibandingkan data *time series* dan data *cross section* menurut Baltagi (2005) adalah :

1. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.

2. Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan lebih efisien.
3. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross-section*.
4. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data *times series* atau *cross-section*, misalnya efek dari upah minimum.
5. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi. Untuk melakukan regresi terhadap variabel maka peneliti menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu :

a) *Common Effect Model*

Metode *common effect* merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *ordinary least squares* (OLS). Metode ini diasumsikan bahwa pelaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu.

b) *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar ruang dan waktu. Dalam estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan *least squares dummy variables* (LSDV) dan

ketika terdapat heteroskedistisitas menggunakan *fixed effect* dengan *cross section weight*.

c) *Random Effect Model*

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep yang berbeda. Namun demikian kita mengasumsikan setiap intersep adalah variabel random atau stokastik. Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu, dengan mengasumsikan setiap kabupaten/kota mempunyai perbedaan intersep. Namun demikian diasumsikan bahwa intersep adalah variabel *random*.

Untuk mendapatkan model yang paling tepat dalam mengelola data panel, terdapat pengujian yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Uji Chow

Uji Chow (*Chow test*) merupakan pengujian guna menentukan model manakah yang paling tepat antara *Common Effect* atau *Fixed Effect* dalam mengestimasi data panel.

2. Uji Hausman

Uji Hausman (*Hausman test*) yaitu pengujian statistik untuk memilih manakah model yang paling tepat digunakan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* dalam estimasi data panel.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier digunakan untuk mengetahui model manakah yang terbaik antara model *Random Effect* dan *Common Effect* (OLS). Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *lagrange multiplier* (LM).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian analisis data dan pembahasan, bab ini berisi tentang hasil temuan serta diskusi mengenai hasil dari penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa uji data panel (gabungan antara *time series* dengan *cross section*). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap dari tahun 2011-2016.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa data-data yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu untuk melihat apakah penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan atau sebaliknya. Setelah pengujian dilakukan, maka data-data tersebut akan dianalisis dan kemudian dilihat apakah sesuai dengan hipotesis yang disusun pada bab 2. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

4.1 Pemilihan Model Yang Tepat

4.1.1 Pemilihan antara Model *Common Effects* dengan Model *Fixed Effects*

Pada bab 3 telah dijelaskan bahwa dalam uji ini akan dibandingkan antara hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa antara slope dengan intersep adalah tetap (model *common effects*) dengan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan slope adalah tetap sedangkan intersepnnya tidak tetap atau berubah-ubah (model *fixed effects*).

H_0 : model *common effect*

H_a : model *fixed effect*

H_0 diterima ketika nilai statistik *Cross-section F* lebih besar dibandingkan nilai statistik *Cross-section Chi-square*. Sementara H_a diterima ketika nilai statistik *Cross-section F* lebih kecil dibandingkan nilai statistik *Cross-section Chi-square*.

Tabel 4.1

Hasil regresi antara *common effect* model dengan *fixed effect* model (Uji Chow)

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section and period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.384772	(23,112)	0.0000
Cross-section Chi-square	205.252461	23	0.0000
Period F	12.542255	(5,112)	0.0000
Period Chi-square	64.027565	5	0.0000
Cross-Section/Period F	15.425096	(28,112)	0.0000
Cross-Section/Period Chi-square	227.559093	28	0.0000

Dapat dilihat dari uji F diatas, nilai *Cross-section F statistic* sebesar 15.384772 dan nilai *Cross-section Chi-Square statistic* sebesar 205.252461. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa *Cross-section Chi-Square statistic* = 205.252461 > *Cross-section F statistic* = 15.384772. Ketika *Chi-Square* lebih besar dari *Cross-section F statistic* maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya, model *fixed effects* lebih baik digunakan dibandingkan dengan model *common effect*. Maka langkah pengujian yang selanjutnya adalah membandingkan antara model *random effect* dengan *fixed effect*.

4.1.2 Pemilihan antara Model *Fixed Effects* dengan Model *Random Effects* (Uji Hausman)

Uji Hausman adalah uji yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pilihan model manakah yang lebih baik antara model LSDV pada pendekatan *fixed effect* serta GLS pada pendekatan *random effect*.

H_0 : model *random effect*

H_a : model *fixed effect*

H_0 diterima ketika nilai statistik *Cross-section random* lebih besar dibandingkan nilai statistik *Cross-section Chi-square*. Sementara H_a diterima ketika nilai statistik *Cross-section random* lebih kecil dibandingkan nilai statistik *Cross-section Chi-square*. Ketika H_0 diterima maka model *common effect* lebih baik digunakan dibandingkan dengan model *fixed effect*, begitu pula sebaliknya ketika H_a diterima maka model *fixed effect* lebih baik digunakan dibandingkan dengan model *common effect*.

Tabel 4.2

Hasil estimasi antara *fixed effect* model dengan *random effect* model (Uji Hausman)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section and period random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1.0000
Period random	0.000000	3	1.0000
Cross-section and period random	13.222395	3	0.0042

Dapat dilihat dari uji Hausman diatas, nilai *Cross-section random statistic* sebesar 0.000000. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa *Cross-section Chi-Square statistic* = 205.252461 > *Cross-section random* = 0.000000. Ketika *Cross-section Chi-Square* lebih besar dari *Cross-section random* maka menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya, *fixed effects* model lebih baik digunakan dibandingkan dengan *random effect* model. Dengan demikian, estimasi yang selanjutnya dilakukan yaitu menggunakan model *fixed effect*.

4.1.3 Estimasi Model *Fixed Effect*

Suatu obyek observasi dengan konstanta yang tetap besarnya dalam berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresinya yang tetap dari waktu ke waktu (*time invariant*) merupakan pengertian dari estimasi dengan model *fixed effect* model.

Tabel 4.3**Hasil Estimasi Akhir *Fixed Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.78318	37.34997	-1.975455	0.0507
LOG(X1?)	0.493557	0.295102	1.672496	0.0972
LOG(X2?)	6.674062	3.305715	2.018947	0.0459
LOG(X3?)	-0.002235	0.053346	-0.041905	0.9666
Fixed Effects (Cross)				
_CS—C	-0.413092			
_CT—C	0.492822			
_CU—C	-21.18345			
_JL—C	-0.898283			
_KWT—C	10.61520			
_BTS—C	0.156946			
_KSG—C	0.027772			
_ADP—C	3.326100			
_MAOS--C	4.313099			
_SPG—C	-2.386567			
_KRY—C	1.599757			
_BNG—C	0.275802			
_NSW—C	0.309437			
_SDJ—C	0.109311			
_KDJ—C	3.694491			
_GDM—C	1.468617			
_PTM—C	-1.820375			

_CPR—C	2.139494
_KRP—C	1.833207
_CMG—C	1.057359
_MJG—C	-0.685836
_WNJ—C	-2.875699
_DYL—C	-1.530145
_KPL—C	0.374040

Fixed Effects (Period)

1—C	0.565963
2—C	0.153221
3—C	0.006429
4—C	-0.201434
5—C	-0.309171
6—C	-0.215010

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.848108	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.806066	S.D. dependent var	0.507018
S.E. of regression	0.223280	Akaike info criterion	0.032350
Sum squared resid	5.583646	Schwarz criterion	0.692309
Log likelihood	29.67079	Hannan-Quinn criter.	0.300520
F-statistic	20.17308	Durbin-Watson stat	1.769693
Prob(F-statistic)	0.000000		

$$Y_{it} = -73.78318 + 0.493557 \log BD_{it} + 6.674062 \log JP_{it} - 0.002235 \log PAD_{it} + E_{it}$$

Keterangan :

Y = Jumlah Kemiskinan (satuan jiwa)

β_0 = koefisien intersep

β_1 = Belanja Daerah (BD) (milyar rupiah)

β_2 = Jumlah Penduduk (JP) (satuan jiwa)

β_3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) (juta rupiah)

Bisa di lihat dari hasil persamaan diatas bahwa : Ketika variabel Belanja Daerah naik sebesar 1% maka Jumlah Kemiskinan akan naik sebesar 0,493557%, kemudian ketika variabel Jumlah Penduduk naik sebesar 1% maka Jumlah Kemiskinan akan naik sebesar 6,674062%, dan ketika variabel Pendapatan Asli Daerah naik sebesar 1% maka Jumlah Kemiskinan akan turun sebesar - 0,002235%.

4.2 Pengujian Statistik

4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sriyana (2014), pengujian koefisien determinasi atau R^2 disebut berfungsi untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Rentang nilai dari R^2 yaitu antara nol sampai dengan satu. Semakin tinggi R^2 nya, maka semakin baik garis regresinya karena dapat menjelaskan nilai data aktualnya. Sebaliknya semakin rendah nilai R^2 nya atau mendekati nol maka garis regresinya semakin buruk

Seperti yang tertera pada tabel 4.3, didapatkan angka koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.848108 atau 84,81%. Artinya sebesar 84,81% variabel independen yaitu Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Jumlah Kemiskinan. Sementara sisanya sebesar 15,19% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

4.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model atau Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan kedalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel tak bebas atau variabel dependen. Apabila nilai *Probabilitas (F-statistic)* lebih besar dari nilai *alfa* maka H_0 diterima atau secara bersama-sama semua variabel bebas (variabel independen) tidak mempengaruhi variabel terikat (variabel dependen).

Sementara sebaliknya ketika H_a diterima jika nilai *Probabilitas (F-statistic)* lebih kecil dari nilai *alfa* maka secara bersama-sama semua variabel bebas (variabel independen) mempengaruhi variabel terikat (variabel dependen).

H_0 : Jika *Probabilitas (F-statistic)* lebih kecil dari nilai *alfa* maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

H_a : Jika *Probabilitas (F-statistic)* lebih besar dari nilai *alfa* maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

Nilai *Probabilitas (F-statistic)* = 0.000000

Dengan *alfa* = 5% atau 0.05

Seperti yang tertera pada tabel 4.3, dapat kita ketahui nilai *Probabilitas (F-statistic)* = 0.000000 < *alfa* = 0.05, maka menolak H_0 . Hal ini berarti Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, serta Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan.

4.2.3 Uji Signifikansi (Uji T)

Uji Signifikansi (Uji T) merupakan pengujian yang dilakukan pada masing-masing variabel independen dengan tujuan untuk mengetahui apakah secara individu variabel-variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *probabilitas (t-statistik)* setiap variabel independen dengan nilai *alfa*.

Ketika *alfa* lebih kecil dari *probabilitas (t-statistik)*, maka H_0 diterima dan menolak H_a . Artinya, variabel independen tersebut secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, ketika *alfa* lebih besar dari *probabilitas (t-statistik)*, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen tersebut secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_0 : Jika *alfa* lebih kecil dari *probabilitas (t-statistik)* maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

H_a : Jika *alfa* lebih besar dari *probabilitas (t-statistik)* maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa nilai masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

a. X_1 (Belanja Daerah)

Nilai *Probabilitas t-statistic* = 0.0972

Dengan *alfa* = 10% atau 0.1

Keterangan :

Uji T variabel X_1 (Belanja Daerah), didapatkan hasil *Probabilitas t-statistic* = 0.0972 < *alfa* = 0.1 atau dapat dikatakan menolak H_0 . Hal ini berarti secara individu variabel X_1 (Belanja Daerah) di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja,

Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

b. X_2 (Jumlah Penduduk)

Nilai *Probabilitas t-statistic* = 0.0459

Dengan *alfa* = 5% atau 0.05

Keterangan :

Uji T variabel X_2 (Jumlah Penduduk), didapatkan hasil *Probabilitas t-statistic* = 0.0459 < *alfa* = 0.05 atau dapat dikatakan menolak H_0 . Hal ini berarti secara individu variabel X_2 (Jumlah Penduduk) di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

c. X_3 (Pendapatan Asli Daerah)

Nilai *Probabilitas t-statistic* = 0.9666

Dengan *alfa* = 5% atau 0.05

Keterangan :

Uji T variabel X_3 (Pendapatan Asli Daerah) didapatkan hasil *Probabilitas t-statistic* = 0.9666 > *alfa* = 0.05 atau dapat dikatakan menerima H_0 . Hal ini berarti secara individu variabel X_3 (Pendapatan Asli Daerah) di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap tidak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pemilihan model yang paling tepat serta analisis regresi yang telah dilakukan, maka akan dijelaskan secara terperinci mengenai uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai perbedaan yang ada dari hasil penelitian ini terhadap penelitian yang menjadi dasar atau rujukan dari penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan dari tiap hipotesis yang telah diuji diatas.

4.3.1 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, diketahui bahwa nilai *Probabilitas t-statistic* dari variable Belanja Daerah sebesar 0.0972, lebih kecil daripada nilai *alfa* 0.1 yang berarti bahwa Belanja Daerah di 24 Kecamatan

(Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Dengan kata lain, hipotesis nol (H_0) ditolak.

Berarti sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iskana (2009) yang mengatakan bahwa pada penelitian tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur menjelaskan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Dengan demikian, dalam pengujian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika variabel Belanja Daerah di tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap naik sebesar 1%, maka Jumlah Kemiskinan untuk tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap akan naik sebesar 0,493557%, sehingga hubungan antara Belanja Daerah dengan Jumlah Kemiskinan positif. Hubungan antara kedua variabel tersebut positif dikarenakan Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap distribusinya masih belum merata dan tidak tepat sasaran, Belanja Daerah tersebut hanya fokus

didaerah perkotaan saja sedangkan didaerah terpencil/belum berkembang masih minim, sehingga mengakibatkan infrastruktur, sarana dan prasarana, tingkat pendidikan dan kesehatan belum merata.

4.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, diketahui bahwa nilai *Probabilitas t-statistic* dari variabel Jumlah Penduduk sebesar 0.0459, lebih kecil daripada *alfa* 0.05 yang berarti bahwa Jumlah Penduduk di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Dengan kata lain, hipotesis nol (H_0) ditolak.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan metode panel data mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dengan kemiskinan.

Selain itu, Todaro (2000) mengemukakan bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut dibuktikan dalam perhitungan indeks *Foster Greer Thorbecke* (FGT), yang mana jika jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika variabel Jumlah Penduduk dari tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap naik sebesar 1%, maka Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap juga akan naik sebesar 6,674062%. Studi kasus di Kabupaten Cilacap arah hubungan antara Jumlah Penduduk dan Jumlah Kemiskinan positif, dikarenakan tingkat kelahiran lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan banyaknya imigran dari daerah lain yang menumpuknya manusia di Kabupaten Cilacap. Banyaknya imigran dari daerah lain ke Kabupaten Cilacap dikarenakan sedikitnya atau kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan di daerah tersebut.

4.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas, diketahui bahwa nilai *Probabilitas t-statistic* dari variable Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.9666, lebih besar daripada nilai *alfa* 0.05 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) di Kabupaten Cilacap tidak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Dengan kata lain, hipotesis nol (H_0) diterima.

Berarti sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansyah (2015) yang mengatakan bahwa semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh masyarakat maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Hal

ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi berbagai kebutuhannya terutama kebutuhan pokok hidupnya.

Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika variabel Pendapatan Asli Daerah dari tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap naik sebesar 1%, maka Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap akan turun sebesar -0,002235%.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang terkait serta analisisnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Hal ini berarti ketika Belanja Daerah di tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Jumlah Kemiskinan untuk tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap akan meningkat juga sehingga hubungan antara Belanja Daerah dan Jumlah Kemiskinan positif.
2. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Jumlah Penduduk dari tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat juga. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2007) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan metode panel data mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dengan kemiskinan.

3. Untuk Pendapatan Asli Daerah, pada hasil analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap. Berarti ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Jumlah Kemiskinan akan menurun, dan sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah menurun maka Jumlah Kemiskinan akan meningkat tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap.
4. Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kemiskinan tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap.

5.2 Implikasi

Dari kesimpulan tersebut, hasil analisis penelitian serta keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya ditambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan selain variabel independen yang diuji pada penelitian ini sebab terdapat banyak variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap Jumlah Kemiskinan sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang lebih menyeluruh mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Jumlah Kemiskinan di suatu wilayah/daerah.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menurunkan Jumlah Kemiskinan sebab Jumlah Kemiskinan merupakan salah satu indikator majunya keadaan di suatu wilayah/daerah. Namun, tidak semua langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan sesuai yang diinginkan,

sehingga diharapkan pemerintah daerah merancang terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang hendak dilakukan untuk mengurangi Jumlah Kemiskinan.

3. Untuk penelitian mendatang, sebaiknya dimasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Jumlah Kemiskinan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran, Belanja Modal, maupun Kinerja Keuangan Daerah lainnya.
4. Perlu adanya peraturan atau regulasi yang ketat dari Pemerintah untuk setiap Belanja Daerah agar setiap pengeluaran tersebut tepat sasaran dan digunakan untuk kegiatan yang produktif semisal pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang memadai. Dengan langkah tersebut diharapkan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap akan menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
5. Perlu adanya langkah yang tegas dari Pemerintah mengenai pertumbuhan Jumlah Penduduk yang semakin bertambah, yakni dengan cara mencanangkan program KB (Keluarga Berencana), serta undang-undang tentang perkawinan untuk mengatur usia minimal seseorang untuk menikah. Dengan langkah tersebut diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Cilacap dan juga dapat menekan angka kemiskinan.
6. Perlu adanya peningkatan kinerja pada sektor unggulan di Kabupaten Cilacap, antara lain di sektor perikanan, sektor pertanian dan sektor industri. Dimana ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi yang

sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap. Sehingga dengan adanya ketiga sektor tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober 2003.
- Astika, Ketut Sudhana. 2010. *Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1 No.01. Universitas Udayana. Bali.
- Baltagi. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition. John Wiley & Sons.
- Bastian Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1 Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus, A (2011). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sulawesi periode tahun 2006-2011”*. Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia
- Firmansyah, Andy Kurniawan dkk. 2015. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012”*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ). Jember, Jawa Timur.
- Iskana, Ida. 2009. *Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran*, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Junaidi, Delis dan Devita. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja DaerahKabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol.2. No.2. Hal. 63-70.
- Kartasamita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES.

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 1 (ayat 13).
- Ritonga, Taufiq I. (2009), *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Said, Hendra. 2010. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kalimantan Timur*”.
- Santoso, Budi (2013). “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2010*, Skripsi Fakultas Universitas Mataram.
- Setiawan, Anjar. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Studi Pada Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setiyawati, Hamzah (2007) yang berjudul “*Analisis Pengaruh PAD, DAU, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*. Universitas Trunojoyo.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2007. “*Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*”, IPB dan Brighten Institute.
- Sugiyono. (2011), Metode Penelitian Kombinasi hal: 60. Bandung: Alfabeta.
- Suryati, Desi. 2015. *Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012*. Jurnal Ilmiah Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Vol.9 No.7. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.

- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode regresi data panel (Dilengkapi analisis kinerja Bank Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: Ekonisia
- Todaro, Michael P, (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, *Tentang Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 Tentang Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 Tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work fpr the Poor*. The World Bank.

LAMPIRAN

I. Output Hasil Regresi *Common Effect Model*

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/22/17 Time: 21:57
Sample: 1 6
Included observations: 6
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.564090	2.486248	-0.629096	0.5303
LOG(X1?)	0.653964	0.153477	4.260986	0.0000
LOG(X2?)	-0.149982	0.048687	-3.080553	0.0025
LOG(X3?)	0.229882	0.034454	6.672183	0.0000
R-squared	0.262370	Mean dependent var		8.723870
Adjusted R-squared	0.246564	S.D. dependent var		0.507018
S.E. of regression	0.440095	Akaike info criterion		1.223733
Sum squared resid	27.11571	Schwarz criterion		1.306228
Log likelihood	-84.10876	Hannan-Quinn criter.		1.257254
F-statistic	16.59903	Durbin-Watson stat		0.606276
Prob(F-statistic)	0.000000			

II. Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 11/22/17 Time: 21:57
 Sample: 1 6
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 24
 Total pool (balanced) observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.78318	37.34997	-1.975455	0.0507
LOG(X1?)	0.493557	0.295102	1.672496	0.0972
LOG(X2?)	6.674062	3.305715	2.018947	0.0459
LOG(X3?)	-0.002235	0.053346	-0.041905	0.9666
Fixed Effects (Cross)				
_CS--C	-0.413092			
_CT--C	0.492822			
_CU--C	-21.18345			
_JL--C	-0.898283			
_KWT--C	10.61520			
_BTS--C	0.156946			
_KSG--C	0.027772			
_ADP--C	3.326100			
_MAOS--C	4.313099			
_SPG--C	-2.386567			
_KRY--C	1.599757			
_BNG--C	0.275802			
_NSW--C	0.309437			
_SDJ--C	0.109311			
_KDJ--C	3.694491			
_GDM--C	1.468617			
_PTM--C	-1.820375			
_CPR--C	2.139494			
_KRP--C	1.833207			
_CMG--C	1.057359			
_MJG--C	-0.685836			
_WNJ--C	-2.875699			
_DYL--C	-1.530145			
_KPL--C	0.374040			
Fixed Effects (Period)				
1--C	0.565963			
2--C	0.153221			
3--C	0.006429			
4--C	-0.201434			
5--C	-0.309171			
6--C	-0.215010			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
 Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.848108	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.806066	S.D. dependent var	0.507018
S.E. of regression	0.223280	Akaike info criterion	0.032350
Sum squared resid	5.583646	Schwarz criterion	0.692309
Log likelihood	29.67079	Hannan-Quinn criter.	0.300520
F-statistic	20.17308	Durbin-Watson stat	1.769693
Prob(F-statistic)	0.000000		

III. Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled EGLS (Two-way random effects)
Date: 11/22/17 Time: 21:58
Sample: 1 6
Included observations: 6
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 144
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.696642	3.379926	1.093705	0.2760
LOG(X1?)	0.362641	0.206605	1.755236	0.0814
LOG(X2?)	-0.121858	0.101609	-1.199285	0.2324
LOG(X3?)	0.105021	0.041856	2.509083	0.0132
Random Effects (Cross)				
_CS--C	-0.110299			
_CT--C	-0.485892			
_CU--C	-0.234490			
_JL--C	0.323006			
_KWT--C	0.093055			
_BTS--C	0.200850			
_KSG--C	-0.065287			
_ADP--C	-0.076385			
_MAOS--C	-0.739487			
_SPG--C	-0.547560			
_KRY--C	0.280627			
_BNG--C	0.123144			
_NSW--C	0.199271			
_SDJ--C	0.206584			
_KDJ--C	-0.054773			
_GDM--C	0.487976			
_PTM--C	0.056673			
_CPR--C	-0.056396			
_KRP--C	0.105312			
_CMG--C	0.405928			
_MJG--C	0.548018			
_WNJ--C	0.263105			
_DYL--C	-0.145725			
_KPL--C	-0.777257			

Random Effects (Period)

1--C	0.292784
2--C	0.003344
3--C	-0.096483
4--C	-0.156568
5--C	-0.097527
6--C	0.054450

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.350696	0.6336
Period random	0.145849	0.1096
Idiosyncratic random	0.223280	0.2568

Weighted Statistics

R-squared	0.054114	Mean dependent var	1.709506
Adjusted R-squared	0.033845	S.D. dependent var	0.236506
S.E. of regression	0.232469	Sum squared resid	7.565881
F-statistic	2.669804	Durbin-Watson stat	1.387674
Prob(F-statistic)	0.049965		

Unweighted Statistics

R-squared	0.192874	Mean dependent var	8.723870
Sum squared resid	29.67043	Durbin-Watson stat	0.484808

IV. Hasil Likelihood Ratio Test (*Chou Test*)

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section and period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.384772	(23,112)	0.0000
Cross-section Chi-square	205.252461	23	0.0000
Period F	12.542255	(5,112)	0.0000
Period Chi-square	64.027565	5	0.0000
Cross-Section/Period F	15.425096	(28,112)	0.0000
Cross-Section/Period Chi-square	227.559093	28	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/22/17 Time: 22:11

Sample: 1 6

Included observations: 6

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.207414	2.824230	-0.781599	0.4358
LOG(X1?)	0.676071	0.194225	3.480859	0.0007
LOG(X2?)	-0.157979	0.047163	-3.349626	0.0010
LOG(X3?)	0.268280	0.053378	5.026051	0.0000

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.368224	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.330785	S.D. dependent var	0.507018
S.E. of regression	0.414769	Akaike info criterion	1.138270
Sum squared resid	23.22446	Schwarz criterion	1.323883
Log likelihood	-72.95544	Hannan-Quinn criter.	1.213693
F-statistic	9.835416	Durbin-Watson stat	0.527267
Prob(F-statistic)	0.000000		

Period fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/22/17 Time: 22:11

Sample: 1 6

Included observations: 6

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.185030	42.62405	-0.215489	0.8298
LOG(X1?)	-0.389547	0.238464	-1.633563	0.1050
LOG(X2?)	2.071317	3.875008	0.534532	0.5940
LOG(X3?)	0.017844	0.044596	0.400130	0.6898

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.763060	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.710407	S.D. dependent var	0.507018
S.E. of regression	0.272846	Akaike info criterion	0.407542
Sum squared resid	8.710052	Schwarz criterion	0.964382
Log likelihood	-2.342992	Hannan-Quinn criter.	0.633810
F-statistic	14.49216	Durbin-Watson stat	1.592258
Prob(F-statistic)	0.000000		

Cross-section and period fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/22/17 Time: 22:11

Sample: 1 6

Included observations: 6

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.564090	2.486248	-0.629096	0.5303
LOG(X1?)	0.653964	0.153477	4.260986	0.0000
LOG(X2?)	-0.149982	0.048687	-3.080553	0.0025
LOG(X3?)	0.229882	0.034454	6.672183	0.0000

R-squared	0.262370	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.246564	S.D. dependent var	0.507018
S.E. of regression	0.440095	Akaike info criterion	1.223733
Sum squared resid	27.11571	Schwarz criterion	1.306228
Log likelihood	-84.10876	Hannan-Quinn criter.	1.257254
F-statistic	16.59903	Durbin-Watson stat	0.606276
Prob(F-statistic)	0.000000		

V. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section and period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1.0000
Period random	0.000000	3	1.0000
Cross-section and period random	13.222395	3	0.0042

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

* Period test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	0.053000	0.362641	0.013719	0.0082
LOG(X2?)	4.776404	-0.121858	10.393456	0.1287
LOG(X3?)	0.057227	0.105021	0.000221	0.0013

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel EGLS (Period random effects)

Date: 11/22/17 Time: 22:03

Sample: 1 6

Included observations: 6

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 144

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-46.58676	35.87047	-1.298750	0.1966
LOG(X1?)	0.053000	0.237496	0.223161	0.8238
LOG(X2?)	4.776404	3.225489	1.480831	0.1413
LOG(X3?)	0.057227	0.044414	1.288485	0.2001

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section fixed (dummy variables)		
Period random	0.145849	0.2991
Idiosyncratic random	0.223280	0.7009

Weighted Statistics

R-squared	0.814178	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.772885	S.D. dependent var	0.479930
S.E. of regression	0.228719	Sum squared resid	6.120527
F-statistic	19.71676	Durbin-Watson stat	1.676598
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.736548	Mean dependent var	8.723870
Sum squared resid	9.684670	Durbin-Watson stat	1.464760

Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	0.643838	0.362641	0.016560	0.0289
LOG(X2?)	-0.107568	-0.121858	-0.000729	NA
LOG(X3?)	0.061500	0.105021	0.000665	0.0915

Period random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/22/17 Time: 22:03

Sample: 1 6

Included observations: 6

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 144

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.089014	3.738051	-0.023813	0.9810
LOG(X1?)	0.643838	0.243405	2.645128	0.0091
LOG(X2?)	-0.107568	0.097958	-1.098099	0.2741
LOG(X3?)	0.061500	0.049163	1.250940	0.2131

Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.350696	0.7116
Period fixed (dummy variables)				
Idiosyncratic random			0.223280	0.2884

Weighted Statistics			
R-squared	0.397224	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.361504	S.D. dependent var	0.287522
S.E. of regression	0.229748	Sum squared resid	7.125832
F-statistic	11.12048	Durbin-Watson stat	1.416485
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.291807	Mean dependent var	8.723870
Sum squared resid	26.03360	Durbin-Watson stat	0.387716

Cross-section and period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	0.493557	0.362641	0.044400	0.5344
LOG(X2?)	6.674062	-0.121858	10.917428	0.0397
LOG(X3?)	-0.002235	0.105021	0.001094	0.0012

Cross-section and period random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/22/17 Time: 22:03

Sample: 1 6

Included observations: 6

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 144

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.78318	37.34997	-1.975455	0.0507
LOG(X1?)	0.493557	0.295102	1.672496	0.0972
LOG(X2?)	6.674062	3.305715	2.018947	0.0459
LOG(X3?)	-0.002235	0.053346	-0.041905	0.9666

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.848108	Mean dependent var	8.723870
Adjusted R-squared	0.806066	S.D. dependent var	0.507018
S.E. of regression	0.223280	Akaike info criterion	0.032350
Sum squared resid	5.583646	Schwarz criterion	0.692309
Log likelihood	29.67079	Hannan-Quinn criter.	0.300520
F-statistic	20.17308	Durbin-Watson stat	1.769693
Prob(F-statistic)	0.000000		

VI. TABEL DATA KABUPATEN CILACAP

Kecamatan	Tahun	Jumlah Kemiskinan	Belanja Daerah	Jumlah Penduduk	Pendapatan Asli Daerah
Cilacap Selatan	2011	7 306	1 241 154 665	83 985	219 310 930
	2012	3 489	1 408 930 700	83 810	178 018 000
	2013	5 101	1 562 817 463	84 093	109 946 325
	2014	2 911	2 218 229 459	84 261	46 378 050
	2015	6 449	1 829 174 108	84 346	14 429 775
	2016	7 797	2 273 410 000	84 431	10 600 000
Cilacap Tengah	2011	4 690	1 314 127 736	68 661	205 130 475
	2012	2 989	1 502 208 100	69 037	144 000 000
	2013	4 502	1 609 837 143	69 709	218 149 240
	2014	2 494	1 809 486 335	70 181	86 522 227
	2015	4 341	2 345 051 661	70 613	36 727 777
	2016	4 502	2 789 892 000	71 045	26 400 000
Cilacap Utara	2011	5 495	1 364 370 337	1 755 268	202 496 043
	2012	3 193	1 569 165 200	1 764 003	175 237 000
	2013	3 021	1 691 349 122	1 768 502	218 917 975
	2014	2 664	1 914 810 198	1 774 649	111 061 205
	2015	3 401	2 404 885 143	1 780 533	60 344 150
	2016	3 781	2 708 897 000	1 781 417	47 500 000
Jeruklegi	2011	9 158	1 547 987 734	96 039	170 032 514
	2012	7 069	1 792 579 000	95 961	112 400 000
	2013	6 504	1 783 352 137	96 090	106 558 650
	2014	5 899	2 016 165 125	96 442	49 121 000
	2015	11 076	2 613 225 363	96 737	28 243 500
	2016	15 648	3 240 274 000	97 032	11 188 800
Kawunganten	2011	10 766	1 352 173 213	16 840	200 315 896
	2012	9 356	1 527 649 000	17 061	156 700 000
	2013	7 784	1 776 730 883	17 163	122 852 896
	2014	7 807	1 900 008 672	17 181	55 862 376
	2015	5 139	1 904 991 532	17 230	16 414 604
	2016	7 784	2 517 025 000	17 279	7 500 000
Bantarsari	2011	7 953	1 084 359 437	80 280	159 331 435
	2012	7 030	1 246 981 500	80 879	111 334 000
	2013	6 202	1 137 165 997	80 812	96 109 022
	2014	5 866	1 762 744 112	81 077	50 123 125
	2015	5 949	1 679 454 643	81 337	8 280 231
	2016	6 202	1 913 059 000	81 627	3 500 000

Kesugihan	2011	13 754	1 917 962 849	79 717	297 724 680
	2012	9 458	2 203 759 000	79 417	198 060 000
	2013	9 205	2 387 964 855	79 463	204 581 504
	2014	7 892	2 839 422 410	78 842	71 097 032
	2015	2 451	3 467 344 506	78 694	20 678 741
	2016	3 579	3 564 081 000	78 546	9 500 000
Adipala	2011	8 982	2 164 614 718	48 079	270 527 582
	2012	6 694	2 423 510 500	47 945	162 000 000
	2013	6 633	2 550 906 852	47 394	136 501 552
	2014	5 586	2 880 512 461	48 731	70 958 698
	2015	6 565	3 071 056 370	48 928	8 166 960
	2016	6 633	3 449 092 000	49 125	8 500 000
Maos	2011	4 929	1 500 089 935	37 269	91 332 688
	2012	2 832	1 639 465 000	37 521	77 430 000
	2013	2 601	1 957 773 628	37 574	70 308 836
	2014	2 363	2 205 993 403	37 660	28 471 903
	2015	2 821	2 567 981 788	37 797	14 236 096
	2016	3 041	3 240 602 000	37 934	12 000 000
Sampang	2011	5 476	1 512 445 845	103 004	86 956 733
	2012	3 711	1 653 920 500	103 322	76 211 000
	2013	2 884	1 827 541 270	103 553	55 447 200
	2014	3 097	2 073 917 765	103 947	23 388 200
	2015	1 908	2 382 194 689	104 280	12 402 500
	2016	2 884	3 010 743 000	104 613	9 900 000
Kroya	2011	14 697	2 146 040 589	65 872	263 387 499
	2012	10 529	2 387 235 600	66 086	142 550 000
	2013	8 721	2 468 218 592	66 246	177 585 300
	2014	8 786	2 852 337 892	66 314	55 801 750
	2015	8 786	3 037 390 190	66 530	28 692 850
	2016	8 851	3 602 192 000	66 746	20 000 000
Binangun	2011	9 467	1 898 890 660	77 090	158 869 352
	2012	6 915	2 170 176 700	77 543	112 202 000
	2013	5 278	2 408 529 131	77 956	94 805 700
	2014	5 770	2 728 505 285	78 010	44 877 200
	2015	8 628	3 372 426 324	78 084	5 387 000
	2016	10 994	3 837 424 000	78 158	10 000 000

Nusawungu	2011	13 782	1 987 134 177	78 464	209 400 050
	2012	8 928	2 262 166 900	78 330	160 041 000
	2013	7 570	2 427 865 542	78 175	107 851 600
	2014	7 450	3 093 167 107	78 512	40 483 825
	2015	7 450	3 846 444 059	78 601	10 122 800
	2016	7 570	3 978 953 000	78 690	7 500 000
Sidareja	2011	9 008	1 402 005 402	80 182	122 149 000
	2012	6 515	1 587 862 000	81 121	88 200 000
	2013	5 888	1 525 808 843	80 957	79 165 000
	2014	5 436	1 937 318 431	81 093	31 565 500
	2015	7 475	2 712 838 726	81 191	4 411 200
	2016	9 062	2 600 187 000	81 289	6 918 000
Kedungreja	2011	9 764	1 452 202 035	45 535	191 779 750
	2012	7 503	1 666 995 500	45 841	149 124 000
	2013	4 733	1 911 076 096	46 211	101 783 000
	2014	6 261	1 944 214 933	46 223	32 549 000
	2015	4 581	2 352 157 886	46 348	11 870 930
	2016	4 733	2 438 361 000	46 473	6 500 000
Gandrungmangu	2011	14 276	1 643 249 298	68 940	252 040 467
	2012	12 202	1 861 321 400	69 096	135 750 000
	2013	10 282	1 843 933 026	69 387	140 055 650
	2014	10 182	2 773 712 987	69 484	57 663 850
	2015	8 989	3 174 840 466	69 613	3 549 900
	2016	10 082	3 161 350 000	69 742	6 000 000
Patimuan	2011	7 183	1 189 292 038	102 373	139 590 275
	2012	5 432	1 339 583 200	104 805	67 800 000
	2013	5 596	1 563 226 794	105 095	77 223 875
	2014	4 533	1 752 180 880	105 426	19 777 750
	2015	5 401	2 187 611 268	105 989	8 474 040
	2016	5 596	2 704 140 000	106 552	3 000 000
Cipari	2011	8 201	1 328 574 766	57 123	152 321 125
	2012	6 688	1 520 201 000	57 228	27 665 000
	2013	6 482	1 668 343 558	57 302	79 372 875
	2014	5 581	2 123 088 015	57 403	32 879 000
	2015	2 105	2 084 934 819	57 600	4 278 500
	2016	5 680	2 577 462 000	57 797	3 200 000

Karangpucung	2011	10 150	1 495 186 051	61 657	199 009 798
	2012	8 757	1 703 513 000	61 879	151 500 000
	2013	6 774	1 966 124 573	62 135	98 673 862
	2014	7 307	2 262 340 662	62 508	53 097 266
	2015	5 463	2 530 880 497	63 021	34 452 005
	2016	6 774	3 049 136 000	63 534	14 000 000
Cimanggu	2011	12 033	1 241 182 794	73 018	266 970 631
	2012	9 560	1 452 625 200	73 214	142 075 000
	2013	7 460	1 618 911 496	73 422	146 949 650
	2014	7 977	2 119 062 773	73 642	100 133 975
	2015	9 859	2 484 170 207	73 825	10 268 850
	2016	11 214	2 842 478 000	74 008	11 200 000
Majenang	2011	17 637	1 743 903 750	97 883	298 048 888
	2012	13 080	2 015 836 500	97 678	232 530 000
	2013	12 215	2 058 958 278	97 482	200 696 075
	2014	10 914	2 410 084 155	97 237	71 844 778
	2015	9 794	2 682 096 993	97 069	23 376 278
	2016	9 898	3 041 014 000	96 901	26 500 000
Wanareja	2011	11 839	1 735 886 230	126 175	199 352 600
	2012	9 412	1 983 236 400	126 629	160 479 000
	2013	7 635	2 027 248 237	127 275	119 323 825
	2014	7 854	2 446 109 195	127 769	59 761 646
	2015	6 182	3 346 327 131	128 317	28 070 676
	2016	7 635	3 001 005 000	128 865	6 000 000
Dayeuhluhur	2011	7 698	1 513 396 965	95 630	78 887 875
	2012	5 578	1 645 818 300	96 332	66 737 000
	2013	5 353	2 216 862 301	96 922	39 593 125
	2014	4 655	2 406 294 616	97 660	15 280 100
	2015	3 723	2 461 249 305	98 494	16 334 750
	2016	3 957	2 928 142 000	99 328	23 245 000
Kampung Laut	2011	2 367	1 244 999 645	62 879	27 517 500
	2012	1 987	1 439 154 700	64 179	15 000 000
	2013	2 283	1 883 585 309	64 757	13 150 000
	2014	1 658	2 081 547 449	65 369	4 288 750
	2015	2 134	2 155 074 319	66 140	1 200 000
	2016	2 283	2 404 992 000	66 911	1 200 000